

RINGKASAN

NIZA FHATUR RAHMI. Sistem Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Kehutanan UPT KPH Wilayah VIII Kotanopan Unit xxx Panyabungan. Accountability System of Business Trip Position Cost at Kehutanan UPT KPH Wilayah VIII Kotanopan Unit XXX Panyabungan . Dibimbing oleh Rini Ratnaningsih SE, M.Ak

Pemerintah baik daerah maupun pusat memiliki berbagai kegiatan setiap tahunnya, tidak terkecuali Kantor Dinas Kehutanan UPT KPH Wilayah VIII Kotanopan Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Perjalanan Dinas Jabatan , Perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal ini adalah perjalanan dinas dalam negeri, yaitu perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Dalam melaksanakan kegiatan dibutuhkan suatu prosedur yang bertujuan untuk mengatur kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Tujuan laporan tugas akhir ini diantaranya adalah Menerangkan kebijakan-kebijakan perjalanan dinas jabatan, Menguraikan fungsi yang terkait perjalanan dinas jabatan, Menerangkan dokumen yang terkait perjalanan dinas jabatan, Menguraikan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan, Menguraikan pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan, dan Menerangkan pengendalian internal perjalanan dinas jabatan. Praktik kerja lapangan dilaksanakan lebih kurang selama 2 (dua) bulan dari tanggal 8 Februari sampai dengan 3 April 2021 di Dinas Kehutanan UPT KPH Wilayah VIII Kotanopan Unit XXX Panyabungan. Data yang diperlukan dalam laporan tugas akhir ini diperoleh dengan beberapa metode diantaranya, observasi pada bagian-bagian yang terkait, wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, dokumentasi data terkait yang mendukung dan studi pustaka.

Dokumen yang digunakan dalam sistem pembayaran biaya dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas jabatan yaitu daftar nominatif, surat tugas, surat perjalanan dinas, daftar rincian biaya, daftar pengeluaran riil, surat permintaan pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM), dan surat perintah pencairan dana (SP2D). Pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem pembayaran biaya dan pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan sudah cukup baik.

Kata Kunci : Sistem Pertanggungjawaban,dan Perjalanan Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.